

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah :

1. Kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan, yang semula presentase kontribusi PBB 2,71% pada tahun 2002 menjadi 3,62% di tahun 2005. Tetapi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 mengalami penurunan yaitu dari 2,71% pada tahun 2001 menjadi 2,63% pada tahun 2002. Rata-rata kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul adalah 2,98%, hal ini berarti bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bantul hampir 3% berasal dari penerimaan PBB. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa apabila dilihat dari presentasinya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul tergolong kecil, hal ini disebabkan penerimaan PBB hanya merupakan salah satu sumber dari pos dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sedangkan masih banyak sumber penerimaan yang lain bagi pendapatan daerah seperti pos PAD dan pos lain-lain pendapatan yang sah.
2. Pencapaian target penerimaan PBB di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 113,

76%. Apabila dilihat dari penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul selama 4 (empat) tahun pertama dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan namun selama tahun 2004 sampai tahun 2005 mengalami penurunan dari 100,9% menjadi 85,76% dengan rata-rata penerimaan selama 5 (lima) tahun adalah 94,89%. Apabila dikaitkan dengan tingkat efektifitas (Kepmendagri No.690.900.327) maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan sangat efektif karena lebih dari (>) 100% sedangkan apabila dilihat dari sektor perkotaan dan pedesaan maka dapat dikatakan efektif karena rata-rata berkisar antara 80-100%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul adalah pedesaan sehingga pemungutan pajak lebih mudah, mengingat jumlah pajak yang jauh lebih kecil dibandingkan daerah perkotaan dan relatif sedikitnya wajib pajak yang berdomisili di luar daerah.

3. Angka pertumbuhan penerimaan PBB cenderung mengalami penurunan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, yang semula 34,51% pada tahun 2002 menjadi 16,66% pada tahun 2004. Tetapi kemudian terjadi peningkatan di tahun 2005, angka pertumbuhan meningkat dari 16,66% dari tahun 2004 menjadi 28,96% pada tahun 2005. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dari segi penerimaan terus mengalami peningkatan namun angka pertumbuhan penerimaan PBB di Kabupaten Bantul belum stabil sehingga kinerja KP PBB masih harus terus ditingkatkan dan lebih dioptimalkan.

4. Trend/ kecenderungan penerimaan PBB di Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan adanya kenaikan, penerimaan PBB pada tahun 2006 akan mencapai nilai sebesar 20.483.081.700 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2010 sekitar 30.728.381.300. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan PBB di kabupaten Bantul mempunyai potensi yang bagus untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul di masa-masa yang akan datang.
5. Berdasarkan analisis SWOT kinerja pemungutan PBB di Kabupaten Bantul maka masing-masing memperoleh nilai kekuatan (Strength) sebesar 72,475 ; nilai kelemahan (Weaknesses) sebesar 58 ; nilai peluang (Opportunities) sebesar 65 dan nilai ancaman (Threats) sebesar 56,5 sehingga diperoleh nilai bersih 14,475 (X) dan 8,5 (Y) dimana hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB di Kabupaten Bantul terletak pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategy) yang berarti bahwa KP PBB Yogyakarta memiliki kemampuan dan peluang besar dalam melaksanakan pemungutan PBB.

Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan analisis adalah apabila dilihat dari persentasenya maka kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bantul tergolong kecil, namun pencapaian target penerimaan PBB selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan yang apabila dikaitkan dengan tingkat efektifitas maka pemungutan penerimaan PBB di Kabupaten Bantul termasuk

sangat efektif dan apabila dilihat dari sektor perkotaan dan pedesaan maka dapat dikatakan efektif.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhannya, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum stabil sehingga kinerja pemungutan PBB masih harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Prediksi penerimaan PBB untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan adanya kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Bantul mempunyai potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian melalui analisis SWOT, kinerja pemungutan PBB di Kabupaten Bantul berada pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan agresif, yang berarti KP PBB Yogyakarta memiliki kemampuan dan peluang besar dalam melaksanakan pemungutan PBB sehingga yang dilakukan adalah strategi meningkatkan kekuatan dan peluang dengan memperbaiki kelemahan serta memperhatikan ancaman yang ada. Secara keseluruhan kinerja pemungutan PBB yang dilakukan oleh KP PBB Yogyakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sudah baik, meskipun begitu kinerja pemungutan harus terus ditingkatkan sehingga potensi yang ada dapat digali secara maksimal.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kesimpulan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menambah jumlah pegawai/ aparat pajak sehingga jumlah pegawai/ aparat pajak dengan jumlah SPOP yang ditangani dapat seimbang, hal ini dapat mempermudah dan memperlancar dalam penanganan pajak.
2. Untuk memperoleh angka pertumbuhan yang stabil maka KP PBB Yogyakarta perlu melakukan pendataan objek pajak dengan lebih akurat terutama terhadap tanah-tanah dan bangunan yang belum dikenakan PBB.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pajak, manfaat membayar pajak, cara pembayaran pajak dan dengan lebih menggiatkan/ mempertegas pelaksanaan Law inforcement (peneraan sanksi).
4. Meningkatkan kemampuan aparat KP PBB Yogyakarta terutama mengenai teknologi komputerisasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan serta perlunya penambahan sarana prasarana dan insentif bagi para pegawai yang terjun langsung ke lapangan agar lebih termotivasi.
5. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tertib dalam pembayaran pajak sehingga lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.
6. Memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi para aparat yang tidak menaati peraturan dan melakukan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001.
- Flavel, Ron and Joe Williams, *Strategic Management*. Australia: Prentice Hall, 1996.
- Handout Short Course Perpajakan, Brevet A dan B Terpadu*. Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UGM. 2005
- Kantor wilayah VIII DJP Jawa Tengah dan DIY. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta. *Panduan Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- RI.1999.UURI No.25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Penerbit CV. Eko Jaya. Jakarta.
- _____.UURI No.22 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Penerbit CV. Eko Jaya. Jakarta.
- RI.2004.UURI No.33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Penerbit CV. Eko Jaya. Jakarta.
- _____.UURI No.32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. Penerbit CV. Eko Jaya. Jakarta.
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Supranto, J., *Statistik : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Supramono, *Posisi Pajak dan Retribusi Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Daerah di Kota Semarang*. Jurnal Studi Pembangunan, No.1 (XV). Hal.37-54. 2003.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003.

Umar, Husein, *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.





LAMPIRAN

serviens in lumine veritatis



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Tlp. 367533, Fax (0274)367796

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 186

Membaca Surat : UAJY Yogyakarta Nomor : 92/R/I
Tanggal : 22 Februari 2006 Perihal : Permoh. Data Utk Skripsi

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 1983 tentang Pedoman pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/12/2004 tentang pemberian ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa

Dijijinkan kepada :

Nama : LAIDY DAIYANA. No. Mhs/NIM : 13795/EA Mhs : UAJY Yk.

Judul : EVALUASI KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Lokasi : Kab. Bantul.

Waktu : Tanggal : 27 Februari 2006 s/d 27 Mei 2006.

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Dinas/ Instansi/ Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberikan laporan kepada Bupati (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul.
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul.
Pada tanggal : 27 Februari 2006

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul.
3. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bantul.
4. Yang bersangkutan.
5. Peringgal.

An. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris

DRS SUDJONO
NIP.010 162 494



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YOGYAKARTA

Jalan Kusumanegara No. 11
Yogyakarta 55166
Kotak Pos 1126

Telepon : (0274) 562375
512952
Faksimile : (0274) 512951

SURAT KETERANGAN

NOMOR : KET. 1680 / WPJ.23 / KB. 0101 / 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JURNADI DIAR
NIP : 060034212
Jabatan : Kepala Subbagian Umum
Kantor Pelayanan PBB Yogyakarta
Alamat : Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : LAIDY DAIYANA
NIM : 02.04.13795

Mahasiswa UNIVERSITAS ATMA JAYA Yogyakarta Fakultas Ekonomi, benar-benar telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan 19 April 2006, dengan judul “ **EVALUASI KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL** “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2006

A.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum

